

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arba, H. M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Bruggink, JJ, *Rechtsreflection*, terjemahan Atif Sidarta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011,
- Christine , S.T Kansil, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata, 2009
- Daliyo, J.B. dkk. *Hukum Agraria I*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001
- Darmalaksana, W, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Erwiningsih, Winahyu, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia-Total Media, 2009.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan, 2008
- , *Hukum Agraria Jilid I*, Jakarta: Djambatan, 1990
- Hazairin., *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas, 1973.
- Hutagalung, Arie. S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malan Bayumedia, 2005.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Standar Operasional Prosedur Pemberian dan Perpanjangan HGB di atas HPL*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Muchsin, et.al. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Murad, Rasmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni. 1991..
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

- , *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1999.
- Philipus M. Hadjon dd, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- , *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Group Media Group, 2012.
- Sembiring, Julius. *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2019.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi, Sarana Perkasa, 2022.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT. Rineka Aditama, 2006.
- Soemardijono, *Analisis Hak Pengelolaan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan, 2006.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2006
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika, 1988
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sulistiyono, Adi, *Negara Hukum Kekuasaan, Konsep dan Paradigma*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, tt.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008
- Sunindhia, W.W. dan Ninik Widiyanti. *Pembaharuan Hukum Agraria*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Sutedi, Adrian, *Serifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011..
- Syarif, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Jakarta: LP3ES, 2009.

JURNAL

- Aditya Darmawan Zakaria, "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria.," *Notaire* 5, no. 1 (2022).
- Adzim, M. F., & Vrikati, N. S., *Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis*. Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman, Volume 8 No 3, 2020.
- Afdal Aperta Safatullah, "Analisis Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Diatas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Nagari Sitapa," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 254–64.
- Alviola, Bella Krisita, and Ana Silviana. "Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021." *Notarius* 16.2 (2023): 764-775.
- Andi Surya Nusantara Djabba et al., "Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Pleno Jure* 11, no. 2 (n.d.): 522293.
- Andre Wahyudi, "Peran Dan Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Di Kota Batam" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).
- Asmorowati, R. M. *Konsep Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume 6 No 1., 2020
- Burlian, Feri. "Analisis Perpanjangan Hak Guna Bangunan diatas Tanah Negara (Studi Kasus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 dan 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuilco-Hotel Hilton)." (2007).
- Gunanegara. *Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 2, 2022.
- Hidayat, Bella Krisita Alviola. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang HGB di atas HPL Pasca Berakhirnya Jangka Waktu*. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2023.
- Huda, Nurul. "Problematisasi Transformasi Sertifikasi Tanah Digital." *Jurnal Kebijakan Pertanahan* Vol. 1, No. 1 (2021): 48–49.

- Kadek Dwitya Partha Wijaya and I Ketut Suardita, "Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 7 (2021).
- Kesek, Praisy Chantika Anatasya. "Penyelesaian Sengketa Hak Guna Bangunan Antara Hotel Sultan Dan Pemerintah Di Tinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960." *Lex Administratum* 12.4 (2024).
- Laksono, Muchammad Agung, Ronny Winarno, and Istijab Istijab. "Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5.2 (2023): 39-54.
- Pawestri, Astrid U. *Analisis Yuridis Tumpang Tindih HPL Pelindo II yang Terbit di atas HGB PT RAI: Kasus Putusan PK-392/PK/PDT/2020 (Mahkamah Agung RI).*
- Putri Maufiroh, Bagus Renata Rachman, and Ety Purnaningrum, "Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 191–96.
- Putri, Berliyan Erika, and Sri Setyadji. "Prinsip Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Hak Pengelolaan (HPL) Pada Tanah Hasil Reklamasi Dalam Perspektif UUPA." *Iblam Law Review* 4.3 (2024): 34-47.
- Rahmi, Elita Eksistensi. Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 3, 2010.
- Septiady, Tedy. "Kepastian Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Terhadap Bidang Tanah Kosong Berlandaskan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Bpn No 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1.4 (2024): 637-648.
- Safa'at, Rachmad. "Masalah Hukum dalam Pemberian Hak atas Tanah kepada Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum IUS* Vol. 8, No. 3 (2020): 459–460.
- Silviana, Ana. "Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi." *Diponegoro Private Law Review* 1.1 (2017).
- Sri Anggraini Wibowo, "Dialektika Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Ikn Dan Undang-Undang Pokok Agraria," Dialektika Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Ikn Dan Undang-Undang Pokok Agraria 8, no. 1 (2025): 1–15.

- Suhail, Ahmad, Farida Patitingi, and Sri Susyanti Nur. "Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan yang Telah Berakhir Perjanjian Pemanfaatannya." *Alauddin Law Development Journal* 5.3 (2023): 512-523.
- Suhartono dan Mutmainnah. *Perubahan Makna Tanah Warisan Pada Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasa*. Jurnal Pamator, Volume 12 No 2., 2019
- Sumardjono, Maria S.W. "Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebagai Instrumen Hukum dalam Penguasaan Tanah Negara: Tinjauan Kritis terhadap UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020): 229–246.
- Tetama, Androvaga Renandra. *Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Tunas Agraria. Volume 6, Nomor 1, 2023.
- Widyantini, Rina. "Harmonisasi Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Pertanahan Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 52, No. 1 (2022): 42–45.
- Yulistriani & Nurhasan Ismail. *Implikasi Bentuk-bentuk Hubungan Hukum Pemanfaatan Tanah terhadap Keberadaan Hak Pengelolaan: Studi Kasus Kawasan Ancol*. Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Zein, Ramli. "Sengketa Pertanahan akibat Tumpang Tindih antara HGB dan HPL: Tinjauan Yuridis dan Praktik Penyelesaiannya." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 1 (2021): 45–60.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961, Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324
- Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL, Hak Atas Tanah, SRS dan Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 187 PK/Pdt/2014

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3551K/Pdt/2016

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1343K/Pdt/2021

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71/G/2023/PTUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 260/KTUN/2024

PTUN Surabaya Nomor 620/B/2019/PTUN.Sby